

	News Title : Bappebti Tangani Aduan Nasabah Pialang Berjangka Secara Berjenjang & Sesuai Prosedur	
	Media Name : kontan.co.id	Journalist : Akmalal Hamdhi
	Publish Date : 15 January 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 2,250,000
	Resources : -	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Perdagangan	Topic : Bappebti Selesaikan Aduan Nasabah secara Berjenjang

Bappebti Tangani Aduan Nasabah Pialang Berjangka Secara Berjenjang & Sesuai Prosedur

Senin, 15 Januari 2024 / 16:37 WIB



6207840 - Logo Bappebti

Reporter: **Akmalal Hamdhi** | Editor: **Yudho Winarto**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menanggapi terkait ramainya keluhan dari para nasabah pialang berjangka.

Bappebti mengungkapkan bahwa dalam menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan dilaksanakan secara berjenjang.

Seluruh proses pemeriksaan, gelar kasus, dan penganan sanksi telah dilakukan sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Demikian diutarakan Plt. Kepala Bappebti Kasan merespons pemberitaan Ombudsman RI terkait penanganan pengaduan nasabah pialang berjangka.

Baca Juga: GudangKripto Hadiri Perkuat Ekosistem Keuangan Digital Indonesia

Langkah tersebut berdasarkan ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Berikutnya, diatur lebih lanjut melalui Pasal 3 Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang PBK.

"Bappebti menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan secara berjenjang. Artinya, Bappebti tidak pernah dalam melindungi nasabah, ungkap Kasan dalam keterangan resminya, Minggu (14/1).

Baca Juga: Ditetapkan SEC, ETF Bitcoin Spot Diproyeksikan Makin Semarak

Kasan mengatakan, sanksi administratif yang dikenakan Bappebti merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tinjauan Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran ketentuan yang sifatnya administratif.

Sementara itu, Kasan menambahkan, terkait permintaan pengembalian dana atau ganti rugi kepada Bappebti telah disediakan jalur penyelesaian melalui pengadilan negeri atau proses arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Hal ini sesuai pilihan penyelesaian perselisihan hukum yang tercantum dalam dokumen perjanjian pemberian amanat nasabah.

Lebih lanjut, Bappebti mengoptimalkan pengawasan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Dalam strategi pengawasan tersebut, Bappebti melakukan beberapa langkah antara lain melalui penguatan regulasi dan literasi, integrasi sistem aplikasi, dan penerapan sistem rating pialang berjangka.

Baca Juga: ETF Bitcoin Resmi Ditetapkan, Bagaimana Dampaknya ke Pasar Kripto Indonesia?

Berikutnya, penyelesaian penanganan pengaduan dan penguatan kerja sama seperti dengan Kejaksaan Agung RI.

Bappebti juga merupakan anggota yang aktif dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Di forum internasional, Indonesia menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) pada rapat pleno pada 25 Oktober 2023 di Paris, Prancis.

Kearifan tersebut menunjukkan peran aktif Bappebti dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selama 2023, Kasan menyebutkan bahwa Bappebti menerima 177 pengaduan nasabah terhadap perusahaan pialang berjangka.

Dari sejumlah aduan tersebut, 82 pengaduan nasabah telah selesai ditangani Bappebti, sedangkan 95 kasus pengaduan masih dalam proses penyelesaian.

Untuk mengurangi jumlah aduan tersebut, hal terpenting yang dilakukan Bappebti adalah penguatan regulasi dan literasi serta optimalisasi implementasi terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi PBK (LSP-PBK).

Baca Juga: Maksimalkan Pertumbuhan, CEO Indodax Sarankan Peninjauan Peraturan Pajak Kripto

LSP-PBK didirikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No. Kep.2048/BNSP/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Lisensi LSP-PBK.

Saat ini, telah terdapat 48 asesor yang memiliki sertifikat LSP-PBK dari BNSP. Dalam waktu dekat, LSP-PBK akan melaksanakan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang PBK untuk Wakil Pialang Berjangka (WPB) dan Wakil Penasihat Berjangka (WPA) melalui ujian kompetensi dan menerbitkan Tanda Lulus Ujian Profesi (TLUP).

Untuk menjadi WPB atau WPA, pemegang TLUP harus mengajukan izin kepada Bappebti untuk dinilai kembali keahliannya. Melalui skema tersebut ini, diharapkan SDM di bidang PBK akan lebih kompeten sesuai dengan bidang keahliannya, baik sebagai WPB maupun WPA.

Dengan demikian, hal ini akan mempengaruhi penurunan aduan nasabah di bidang PBK.

Baca Juga: PT KBI Ditunjuk Jadi Lembaga Kliring Berjangka Perdagangan Fisik Asat Kripto

Penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi dan SDM berkualitas adalah salah satu strategi taktis Bappebti bersama para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kinerja PBK.

Strategi lainnya yaitu optimalisasi bursa crude palm oil (CPO), penguatan ekosistem bursa aset kripto, peningkatan transaksi multilateral, antara lain komoditas tnah dan emas digital, serta pengembangan komoditas strategis lainnya.

Berikutnya optimalisasi sistem resi gudang dan penguatan pasar lelang komoditas, serta perbaikan tata kelola layanan Bappebti yang berkelanjutan.

TERPOPULER

1
Pelaku Usaha Keluhkan Kemiskinan Tarif Pajak Hiburan

2
Soal Kebijakan Tarif Pajak Hiburan Baru, Begini Tanggapan Lucy In The Sky (LUCY)

3
Telkom dan PLN Icon Plus Ditunjuk Jadi Penyedia Infrastruktur Telekomunikasi di IKN

JANGAN LEWATKAN

1
2 Hari Lagi Sanggah Kuda Sekelaki SNP 2024 Berakhir, Cak Lagi Cara Mengajukannya

2
Tata Cara Registrasi Akun SNPMB 2024 Buat Siswa Peserta SNP dan SNBT

3
OPPO Reno11 T 5G: Harga Baru Januari 2024 dan Spesifikasi Lengkap

